

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID DI LINGKUNGAN BPOM S/D TRIWULAN IV TAHUN 2024



170

Permintaan Informasi Publik

145

Permintaan Informasi Dikabulkan Sepenuhnya

12

Permintaan Informasi Dikabulkan Sebagian

13

Permintaan Informasi yang Ditolak

Gender



66,47%



33,53%

Profil Pemohon Informasi Publik



79,41%

Pelajar/Mahasiswa



9,41%

Karyawan



4,71%

Masyarakat Umum lainnya



2,35%

PNS/TNI/POLRI



1,76%

Apoteker



1,18%

LSM



0,59%

Sarjana Hukum

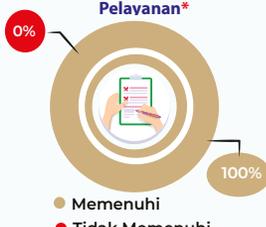
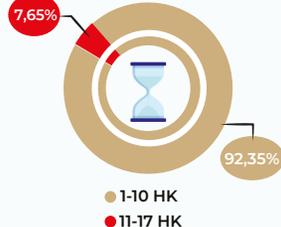


0,59%

Pelaku Usaha

Waktu Pelayanan

Pemenuhan Jangka Waktu Pelayanan*



Rata-rata Jangka Waktu Pelayanan

3,98
Hari Kerja (HK)

*Paling lama 17 HK

2

Pengajuan Keberatan

sudah ditindaklanjuti dengan waktu pelayanan 17 HK (memenuhi jangka waktu pelayanan paling lama 30 HK)

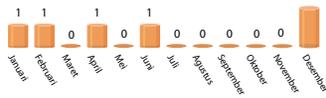
2

Pengajuan Sengketa Informasi Publik

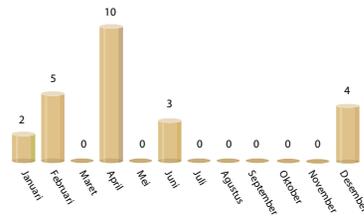
masih dalam proses di Komisi Informasi Pusat

Data PPID BPOM

Jumlah Permintaan

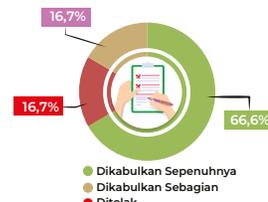


Waktu Pelayanan (HK)*



*Paling lama 17 HK

Tindak Lanjut Permintaan Informasi Publik

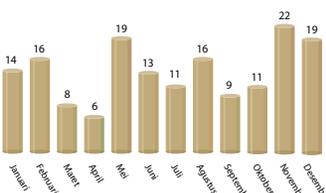


Alasan Permintaan Ditolak/Dikabulkan Sebagian

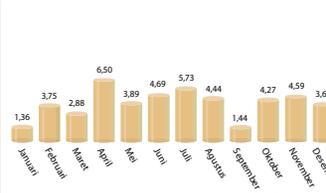


Data PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM

Jumlah Permintaan



Waktu Pelayanan (HK)*



*Paling lama 17 HK

Tindak Lanjut Permintaan Informasi Publik



Alasan Permintaan Ditolak/Dikabulkan Sebagian



Topik Informasi yang Diminta

- Daftar produk dan perusahaan Obat dan Makanan yang terdaftar di BPOM
- Data lengkap dan dokumen terkait izin edar Vaksin Polio nOPV2 Biofarma dan semua vaksin COVID-19
- Data dan informasi di bidang pengawasan rokok
- Data dan informasi tentang regulasi dan prosedur impor makanan
- Data hasil pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024
- Data hasil pengujian produk pangan
- Data keracunan makanan tahun 2020-2023
- Data obat palsu dan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat tahun 2024
- Data penelitian tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengedarkan sediaan farmasi dan obat tradisional tanpa izin edar
- Data pengawasan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan
- Data pengawasan Obat dan Makanan ilegal
- Informasi tentang pelaksanaan produksi pangan yang baik
- Informasi terkait jajanan sekolah yang mengandung zat berbahaya di Surabaya dan keterlibatan pemerintah
- Informasi terkait manajemen BPOM
- Informasi terkait peran BPOM dalam perlindungan konsumen produk Obat dan Makanan
- Informasi terkait produk obat yang mengandung etilen glikol, dietilin glikol, dan etilen glikol butil eter dan peran BPOM dalam pengawasan peredarannya
- Peninjauan informasi terkait metode sampling produk kosmetik, tugas dan fungsi apoteker dalam pelaksanaan sampling produk kosmetik, serta standar operasional prosedur dalam melakukan sampling produk kosmetik
- Permintaan wawancara tentang pelaksanaan program desa pangan aman
- Produk atau jenis obat-obatan balita yang lolos uji
- Salinan atau dokumen Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan Permintaan Informasi Publik

- Penelitian/Tugas Akhir/Skripsi/Tesis
- Bahan Informasi
- Pendaftaran izin edar
- Sebagai upaya administratif dan hukum somasi Kementerian Kesehatan
- Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah, informed consent dari upaya administratif hukum dan uji materiil Undang-Undang Kesehatan

Rekomendasi

- Melakukan update informasi publik di website BPOM, subsite Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta media publikasi lainnya, terutama informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan pre market dan post market.
- Melakukan pendokumentasian informasi publik yang terdapat pada Daftar Informasi Publik BPOM sesuai Unit Kerja Pusat/UPT pemilih/penyedia informasi dengan baik sesuai ketentuan pengelolaan kearsipan untuk mempermudah penelusuran dan mempercepat waktu layanan.
- Meningkatkan konsistensi pendokumentasian dan pelaporan layanan permintaan informasi publik dan/atau layanan pengajuan keberatan PPID Pelaksana pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) sesuai ketentuan dan tepat waktu.
- Meningkatkan koordinasi, pendampingan/pembinaan, dan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan layanan informasi publik terutama kepada PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT yang belum mendapatkan predikat Informatif berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM tahun 2024.